

MENAKAR EFEKTIVITAS PENYULUH INFORMASI PUBLIK DI WILAYAH 3T

ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC INFORMATION EXTENSION OFFICER IN THE 3T REGION

Sri Hendriani¹, Angki Kusumadewi²

¹*Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Indonesia*

²*Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan
Informasi, Indonesia*

¹*Email: shendriani110279@gmail.com*

²*Email: angki001@kominfo.go.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebermaknaan Penyuluh Informasi Publik pada masyarakat terdepan, terluar dan tertinggal. Lima aspek penting yang akan diungkapkan dalam perspektif teori komunikasi Laswell meliputi kompetensi, proses, sarana, konten dan hasil penyuluhan. Informasi diperoleh dengan angket pada 399 responden dan wawancara pada 180 orang *opinion leader* terpilih. Analisis dilakukan dengan pendekatan *mixed method*. Hasil riset menunjukkan bahwa para penyuluh informasi publik menunjukkan kinerja yang efektif dan program ini pun efektif.

Kata kunci: penyuluh; keterbukaan informasi; kompetensi; komunikasi

ABSTRACT

This study seeks to describe the significance of public information extension officers in remote, underprivileged, and frontier areas. Counseling's competency, method, means, content, and outcomes will be discussed in light of Laswell's communication theory. Through surveys of 399 respondents and conversations with 180 selected opinion leaders, information was gathered. The analysis was conducted using a combination of techniques. Results indicated that public information extension workers performed effectively, and the program's efficacy indicated that it was effective as well.

Key words: extension officer; competences; communication; information disclosure



PENDAHULUAN

Hak publik untuk mendapatkan informasi secara komprehensif atas kebijakan dan program pemerintah terkait dengan apa yang akan, sedang dan sudah dilakukan pemerintah dalam membangun negeri, serta informasi strategis lainnya yang memiliki nilai kebermanfaatannya tinggi bagi masyarakat dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf F (Prakoso, A. R. (2019; Mustofa, S., 2020)). Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib berupaya memastikan implementasi dari pasal tersebut.

Pemerataan informasi menjadi kata kunci atas hal ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat Indonesia yang mendiami wilayah yang sulit terjangkau oleh informasi dan infrastruktur di pusat kota (Lie, K. B., 2018; Ap, A. R., Tumober, R. T., & Safitri, F., 2021). Untuk itu, sejak tahun 2017, melalui dokumen Nota Kesepahaman dan turunannya yaitu Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kementerian Agama yang terus diperbaharui secara berkala, keduanya sepakat untuk memberdayakan Penyuluh Agama Non PNS dalam kegiatan diseminasi informasi publik khususnya bagi masyarakat di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Para penyuluh ini kemudian disebut dengan Penyuluh Informasi Publik (PIP).

Atas kesepakatan tersebut, orang-orang terpilih ini tidak lagi sebatas menyampaikan informasi dengan muatan keagamaan, yang selama ini menjadi kesan tugas pokok mereka (Nurkholis, N., Istifianah, I., &

Rahman, A. S. 2020; Santiawan, I. N. 2020; Hidayat, N. L. 2020). Pada dasarnya penyuluh agama juga berkewajiban menyampaikan informasi pembangunan melalui Bahasa agama sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 9 Tahun 2021. Untuk fungsi ini, kehadiran mereka sebagai penyuluh informasi publik semakin menemukan bentuknya. Mereka harus menyampaikan program-program prioritas pemerintah yang bermanfaat secara langsung bagi kehidupan keseharian masyarakat, khususnya di pedesaan (Nugraha [ed.], 2021; Kurniawansyah, H., Kurniadi, A. B., & Yamin, M. 2022).

Penyuluh agama menjadi pilihan tepat untuk terlibat sebagai bagian dari perluasan informasi publik. Jumlahnya yang mampu menjangkau sampai pelosok menjadi niscaya. Berdasarkan data dari epa.kemenag.go.id (diakses, Oktober 2022) jumlah Penyuluh Agama Islam se-Indonesia adalah 5002 orang Penyuluh Agama Fungsional, Pegawai Negeri Sipil dan 45.394 orang Penyuluh Agama Non Fungsional atau honorer. Jumlah ini belum ditambah dengan penyuluh agama dari bimas lainnya, seperti Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Penyuluh Agama non PNS inilah yang dilibatkan sebagai bagian dari perluasan penyampaian program pemerintah dengan sebutan Penyuluh Informasi Publik.

Mengingat program ini sudah berjalan dua tahun, dan masih akan berlanjut, maka penting untuk dilakukan riset evaluatif sebagai upaya untuk memotret efektivitas penyuluhan informasi publik di masyarakat 3 T. Riset ini dipusatkan dalam perspektif komunikasi Laswell (2007). Laswell mengemukakan dimensi komunikasi

pada lima dimensi, yaitu siapa menyampaikan hal apa kepada siapa melalui apa dan bagaimana hasil atau dampaknya bagi penerima pesan. Rumusan ini seringkali disingkat dengan 5W, yaitu *Who say What in Which channel to Whom with What effect* (Lasswell, 2007; Sunarno Atmodjo [ed.], 2021; Putra, D. K. S. 2015; Syaputra, A., 2021).

Teori Lasswell dipilih sebagai perspektif riset karena teori Lasswell ini seperti yang diungkapkan oleh Sudirjo dan Alif (2021) memiliki karakteristik yang kas diantaranya propaganda karena menitik beratkan pada hasil luaran serta menjadi pertimbangan dalam komunikasi persuasi. Penyuluh agama, pada dasarnya menjadi agen propaganda pemerintah bagi masyarakat untuk menyampaikan secara persuasif mengenai program-program prioritas. Melalui pendekatan Lasswell diharapkan tujuan utama yaitu tersampainya program prioritas ini kepada masyarakat dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait peran penyuluh agama untuk menyampaikan kebijakan pemerintah misalnya oleh Octaviana (2021) yang meneliti peran penyuluh agama dalam pencegahan radikalisme agama. Sementara itu Kusnandar, N. (2021) memotret peran penyuluh agama dalam pengarusutamaan moderasi beragama yang menjadi program prioritas pemerintah sejak tiga tahun terakhir. Mazid, S., Rumawi, R., Prabowo, W., & Hakim, S. (2021) melihat peran penyuluh agama dalam penguatan mental spiritual masyarakat dalam menghadapi bencana covid-19. Secara khusus, Andrian, B. (2019)

memotret pola komunikasi penyuluh agama di daerah 3T.

Meskipun sudah ada penelitian-penelitian tersebut mengenai kehadiran penyuluh agama dalam program pemerintah selain aspek keagamaan, namun belum ada yang secara spesifik mengulas dalam kapasitas sebagai penyuluh informasi publik. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.

Penelitian ini akan memotret efektivitas penyuluh agama sebagai penyuluh informasi publik dengan perspektif teori komunikasi Laswell. Informasi yang dikumpulkan dari responden menekankan pada 5 (lima) indikator, yaitu kompetensi penyuluh informasi publik, konten penyuluhan, proses penyuluhan, hasil kegiatan penyuluhan, dan sarana serta prasarana yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan.

METODE

Riset ini menggunakan pendekatan *mix method* yaitu kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat penerima manfaat program penyuluh informasi publik (Subagyo, A., & IP, S., 2020). Sementara kualitatif diukur dengan melakukan wawancara singkat kepada *opinion leader* (Jaya, I. M. L. M. 2020; Nurulita, F. S., & Primadini, I. 2021).

Jumlah populasi masyarakat penerima informasi publik melalui program penyuluh informasi publik sebanyak 133.168 orang dari bulan Januari hingga Oktober 2021. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus slovin dan *margin of error* sebanyak 5% diperoleh jumlah sampel sebesar 398,8 dibulatkan menjadi 399 responden. Selanjutnya,

sebagai upaya memotret seluruh wilayah Indonesia, jumlah 399 responden dibagi 34 Provinsi sehingga rata-rata responden setiap Provinsi sebanyak 11 atau 12 responden.

Seluruh informasi, data kuantitatif yang diperoleh melalui angket diolah dengan analisis deskriptif kuantitatif. Demikian juga dengan informasi dari narasumber kunci melalui wawancara pada 180 partisipan yang telah ditentukan (*purposive*) pada perangkat desa diolah dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jumlah partisipan wawancara ini mewakili tiga bagian Indonesia. 60 orang mewakili Indonesia bagian barat, 60 orang mewakili Indonesia bagian tengah dan 60 orang lagi mewakili wilayah Indonesia bagian timur. Distribusi partisipan per-provinsi sebagai berikut,



Gambar sebaran partisipan
 Sumber : Data diolah.

Interpretasi data dibuat dengan klasifikasi dengan distribusi frekuensi dan interval yang sama. Analisis deskriptif ini untuk melihat kecenderungan distribusi dan frekuensi variabel dan tingkat efektivitas penyuluh informasi publik. Tingkat efektivitas ini dianalisis dengan skor rata-rata yang diperoleh dengan Teknik *weight means scored* dengan rumus:

$$\chi = \frac{x}{n}$$

Dimana χ adalah rata-rata skor responden dan x adalah jumlah skor dari setiap alternatif jawaban responden sementara n adalah jumlah responden (Sugiyomo, 2012).

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria dan penafsiran seperti terlihat pada tabel berikut,

Tabel 1.
Kriteria Skor Rata-rata Variabel

Rentang nilai	Kriteria
3,36-4,00	Sangat Efektif/ A
2,51-3,25	Efektif/ B
1,76,2,50	Kurang Efektif/ C
1,00-1,75	Tidak Efektif/ D

Sumber: berdasarkan perhitungan rumus interval (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah diungkap dalam pendahuluan, riset ini bermaksud mengungkapkan efektivitas penyuluhan informasi publik dengan perspektif Lasswell. Uraian pada bagian hasil dan pembahasan ini meliputi lima aspek, yaitu penyuluh dengan fokus utama pada kompetensi mereka, aspek konten atau substansi penyuluhan, aspek media layanan, aspek sasaran dan aspek hasil datau dampak.

1. Kompetensi Penyuluh

Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 16.0 diperoleh bahwa Kompetensi Penyuluh Informasi Publik (PIP) dinilai sangat baik dalam melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan/Program Prioritas Pemerintah kepada masyarakat khususnya di wilayah 3T. Data ini pun diperkuat dengan hasil wawancara kepada Aparat Desa setempat bahwa kompetensi PIP skor 3.38 artinya sangat baik. Karena PIP ramah, menguasai

materi dan mampu menyampaikan informasi dengan Bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh Masyarakat.

Kompetensi komunikatif ini merupakan kompetensi dasar dalam pelaksanaan tugas penyuluhan. Seperti diungkapkan Hidayatullah (2012) Penyuluh (dalam hal ini penyuluh agama honorer), berada pada level yang tinggi untuk aspek kompetensi komunikasi.

Melalui data di atas, maka dapat dibaca bahwa penyuluh informasi publik memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka. Hal ini pada gilirannya berkontribusi positif dalam memenuhi kriteria efektivitas penyuluhan. Informasi pada tabel berikut dapat memberikan gambaran dimensi yang berkontribusi pada pembentukan profil penyuluh informasi publik yang kompeten dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya.

Tabel 2.
Data Hasil Analisis Kompetensi Penyuluh Informasi Publik

No	Indikator	Penilaian	Kategori
1	Penyuluh mampu menyampaikan informasi dengan kalimat yang mudah dipahami	3.49	Sangat Baik
2	Penyuluh mampu menjawab pertanyaan dari Masyarakat	3.41	Sangat Baik
3	Penyuluh memberikan contoh ketika menyampaikan Informasi	3.41	Sangat Baik
4	Penyuluh mampu menyebutkan sumber informasi ketika menyampaikan informasi	3.42	Sangat Baik
5	Penyuluh menerapkan 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan, Santun)	3.59	Sangat Baik
Jumlah		3.46	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

Informasi tabel di atas sejalan dengan hasil penelitian Hidayatullah (2012), Andrian, B. (2019), Harnika, N. N. (2020), dan Rosdialena, R., Dewita, E., Maiseptian, F., Thaheransyah, T., & Herawati, A. A. (2021). Penyuluh agama yang menjadi penyuluh informasi publik pada umumnya unggul dalam kemampuan komunikasi dengan kelompok sasaran.

2. Konten Penyuluhan

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 16.0 diperoleh

bahwa kualitas dan kuantitas konten informasi yang disampaikan kepada Masyarakat khususnya wilayah 3T oleh Penyuluh Informasi Publik dinilai sangat baik. Data ini pun diperkuat dengan hasil wawancara kepada Aparat Desa setempat dimana kualitas konten informasi penyuluhan skor 3.52 artinya sangat baik karena informasinya sangat dibutuhkan, bervariasi, terbaru (*up to date*), dilengkapi dengan data yang akurat dan aktual serta sumber informasinya dapat dipercaya.

Tabel 3.
Data Hasil Analisis Konten Penyuluhan Informasi Publik

No	Indikator	Penilaian	Kategori
1	Penyuluh menyampaikan informasi publik setiap Minggu	3.21	Baik
2	Penyuluh menyampaikan 3 macam atau lebih tema informasi publik	3.31	Sangat Baik
3	Informasi publik yang disampaikan disertai dengan Data	3.37	Sangat Baik
4	Informasi publik disampaikan dalam bentuk gambar (visual)	3,36	Sangat Baik
Jumlah		3.31	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 16 menunjukkan 135 (34%) responden menerima informasi Kebijakan/Program Prioritas Pemerintah sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu. Kemudian jenis konten penyuluhan yang paling banyak diterima oleh responden adalah Informasi Penanganan Covid-19 meliputi Protokol Kesehatan, Adaptasi Kebiasaan Baru, Vaksinasi Covid-19, dan Antisipasi Covid-19 dengan presentase 39%.

Pada tahun 2020 dan 2021, informasi penting yang harus sampai dengan baik kepada masyarakat adalah penanganan covid-19. Ada banyak kasus bagaimana masyarakat merespon beberapa informasi penting mengenai penangan covid-19 ini dengan keliru. Bahkan diantaranya dikaitkan dengan perspektif agama (Bistara, 2020). Isu mengenai penjarangan atau pelarangan berkerumun dalam hal peristiwa keagamaan sering mendapat tantangan dari agamawan sendiri (Firdausi, P. N., Ghofur, A., & Subahri, 2020). Sementara itu, sesungguhnya agama sendiri

memiliki logika hukum dan kemaslahatan yang terbuka untuk menjadi bahan pertimbangan (Sidqi, I., & Witro, 2021). Dengan demikian, kompetensi penyuluh dalam mengemas dan menyampaikan informasi terutama terkait penanganan covid dan isu-isu strategis lainnya menjadi sangat penting.

3. Proses Layanan dan sarana Penyuluhan

Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 16.0 diperoleh bahwa selama proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan informasi kebijakan/program prioritas pemerintah oleh Penyuluh Informasi Publik dinilai baik bagi Masyarakat khususnya wilayah 3T. Data ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada Aparat Desa dimana Proses Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan skor 3,47 artinya sangat baik. Karena mengingat pentingnya informasi yang disampaikan, sehingga masyarakat tetap berusaha untuk hadir pada kegiatan penyuluhan walaupun di masa pandemi.

Tabel 4.
Data Hasil Analisis Proses Layanan Penyuluhan Informasi Publik

No	Indikator	Penilaian	Kategori
1	Penyuluhan dilakukan tidak lebih dari 60 menit	3.21	Baik
2	Penyuluhan dinantikan oleh masyarakat	3.31	Sangat Baik
3	Pada saat penyuluhan terdapat sesi tanya jawab	3.37	Sangat Baik
4	Penyuluhan dilakukan di tempat yang tenang	3,36	Sangat Baik
Jumlah		3.31	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 16.0 diperoleh bahwa sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan informasi kebijakan/program prioritas pemerintah oleh Penyuluh Informasi Publik dinilai sangat baik bagi Masyarakat khususnya wilayah 3T. Namun, melihat hasil wawancara

kepada Aparat Desa, ada beberapa Aparat Desa yang mengharapkan adanya ketersediaan sarana dan prasarna pendukung kegiatan penyuluhan ini, seperti buku saku/infografis/poster agar proses diseminasi informasi kebijakan/program prioritas pemerintah bisa lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Tabel 5.
Data Hasil Analisis Sarana Penyuluhan Informasi Publik

No	Indikator	Ketersediaan	Kategori
1	Ketersediaan buku saku/infografis/poster materi informasi publik	76%	Sangat Baik
2	Ketersediaan ruang penyuluhan sesuai dengan protokol kesehatan	95%	Sangat Baik
3	Ketersediaan sarana mencuci tangan di tempat penyuluhan	96%	Sangat Baik
4	Ketersediaan alat pengukur suhu di tempat penyuluhan	78%	Sangat Baik
Jumlah		86%	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

4. Sasaran Penyuluhan

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 16 diperoleh bahwa sebagian besar responden riset ini adalah Perempuan sebanyak 237 (51%) dan Laki-laki sebanyak 162 (49%). Kemudian sebanyak 189 (47%) responden berusia 10 s.d. 30 tahun, 170 (43%) berusia 31 s.d. 50 tahun, dan 40

(10%) berusia 51 s.d 70 tahun. Pekerjaan responden hampir sebagian besar adalah 162 (42%) pegawai swasta. Selanjutnya, jenjang pendidikan responden sebagian besar 174 (44%) SMA dan 173 (43%) SMP.

Berdasarkan data ini, tampak bahwa sasaran penyuluhan seperti halnya kelaziman dalam masyarakat,

kaum ibu selalu mendominasi kehadiran dalam setiap kegiatan penyuluhan. Hal ini terutama di daerah pinggiran, para leki-laki lebih banyak bekerja di sektor luar dibandingkan sektor domestik. Demikian pula jika dilihat dari aspek usia, mereka yang bisa hadir dengan lebih leluasa adalah berusia di atas 30 tahun. Di desa berbeda dengan diperkotaan. Rentang usia di atas 30 masuk kategori dewasa dan sedikit melakukan kegiatan di luar daerah (Nugraha, 2018). Hal ini selaras dengan Pendidikan yang dapat mereka selesaikan masih pada jenjang menengah dan dasar. Dengan demikian, para sasaran ini pada dasarnya akan sedikit menerima informasi yang memadai dari pemerintah jika para penyuluh informasi publik tidak hadir di tengah-tengah mereka.

5. Hasil Penyuluhan

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 16.0 diperoleh bahwa kegiatan diseminasi informasi kebijakan/program prioritas pemerintah oleh Penyuluh Informasi Publik dinilai memberikan dampak yang sangat baik bagi Masyarakat khususnya wilayah 3T. Karena informasi yang disampaikan bermanfaat, berguna, dan sesuai kebutuhan masyarakat sehingga mendorong Masyarakat untuk turut serta menyebarkan kembali informasi yang diperolehnya kepada lingkungan terdekatnya. Selanjutnya, Data ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada Aparat Desa dimana keberadaan PIP di wilayahnya skor 3,78 artinya sangat berdampak positif. Karena PIP membantu mengedukasi, memberikan akses informasi kebijakan/program prioritas yang akurat dan jelas.

Tabel 6.

Data Hasil Analisis Dampak Penyuluhan Informasi Publik

No	Indikator	Ketersediaan	Kategori
1	Saya menilai informasi publik yang diberikan Bermanfaat	3.48	Sangat Baik
2	Saya menyukai informasi publik yang disampaikan oleh penyuluh	3.43	Sangat Baik
3	Saya bersedia menyebarluaskan kembali informasi publik di lingkungan terdekat	3.34	Sangat Baik
Jumlah		3.42	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

Hadirnya penyuluh agama sebagai bagian utama dalam penyuluh informasi publik sesungguhnya menegaskan arti penting dari tugas dan fungsi mereka untuk menyampaikan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama (Permenpan RB no. 9 tahun 2021). Berdasarkan temuan-

temuan dan pembahasan di atas, artikel ini juga menyatakan bahwa persepsi umum mengenai kehadiran penyuluh agama sebagai bagian dari makna hadirnya negara dalam pembinaan keagamaan saja menjadi terkoreksi. Beberapa artikel cenderung melihat penyuluh agama sebagai tokoh agama

sesuai dengan keyakinanya (Nugraha, 2013; Ilham, 2019); Hidayat, 2020; Muchlis, 2020; Achfandhy, 2020).

Penelitian ini juga menegaskan bahwa kompetensi penyuluh dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai kelompok binaanya penting untuk ditopang dengan kemampuan komunikasi yang baik. Hal ini senada dengan temuan-temuan artikel lain yang mengetengahkan pentingnya dimensi komunikasi dikuasai oleh para penyuluh seperti diungkapkan Sadono (2009), Hidayatullah (2012), Alif, (2017), Andrian (2019), Hidayat (2020) dan Sirajuddin, Z., & Kamba, P. L. (2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan pengukuran dan pembahasan di atas maka dapat

disimpulkan bahwa Penyuluh Informasi Publik sangat efektif dalam menyebarkan informasi kebijakan/program prioritas pemerintah khususnya masyarakat wilayah 3T.

Penelitian ini juga merekomendasikan :

1. Bagi pengembang program, agar meningkatkan kualitas sarana yang sudah tersedia dengan menambah sarana berupa buku saku/*leaflet*, dan sejenisnya yang dapat disebarluaskan Kembali oleh penerima manfaat layanan penyuluhan.
2. Bagi peneliti untuk melakukan riset lanjutan terkait pengukuran kualitas Program PIP oleh masyarakat secara real time dan otomatis, dan atau menambahkan indikator *outcome* dari Program PIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Achfandhy, M. I. (2020). Aktualisasi Dakwah Transformatif di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Abdimas ADPI Sosial dan Humaniora*, 1(1), 6-11.
- Alif, M. (2017). Partisipasi petani dalam komunikasi penyuluhan. *Metacommunication; Journal of Communication Studies*, 2(2).
- Andrian, B. (2019). Pola Komunikasi Penyuluh Agama Islam Di Daerah 3T. *Khazanah Sosial*, 1(1), 32-48.
- Ap, A. R., Tumober, R. T., & Safitri, F. (2021). Migrasi Orang Biak di Kota Jayapura. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 5(1), 88-104.
- Bistara, R. (2020). Polemik Agamawan dan Sainis Seputar Covid-19: Menilik Gagasan Integrasi Agama dan Sains Perspektif Mehdi Golshani. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, 5(2), 263-286.
- Firdausi, P. N., Ghofur, A., & Subahri, B. (2020). Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 6(2), 281-301.
- Harnika, N. N. (2020). Strategi Komunikasi Melalui Media Visual Penyuluh Agama Hindu Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Mataram. *Jurnal SASAK: Desain Visual Dan Komunikasi*, 2(2), 67-74.
- Hidayat, N. L. (2020). Strategi Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah. *Indonesian Journal of Islamic Communication*, 3(1), 40-66.

- Hidayatullah, M. T. (2012). Kompetensi Komunikasi Penyuluh Agama Honorar di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. *Harmoni*, 11(1), 67-85.
- Ilham, I. (2019). Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 49-80.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Kurniawansyah, H., Kurniadi, A. B., & Yamin, M. (2022). Evaluasi Program Penyuluh Agama Islam Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Kapita Selektu Administrasi Publik*, 3(1), 123-131.
- Kusnandar, N. (2021). Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pemahaman Moderasi Beragama. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 2(2), 217-241.
- Lasswell, Harold. (2007). The structure and function of communication in society. *Communication in Society*. 215-228.
- Lie, K. B. (2018). *Pembangunan Akses Informasi Masyarakat Perbatasan Melalui Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika (Studi di Dinas Telekomunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Mazid, S., Rumawi, R., Prabowo, W., & Hakim, S. (2021). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pelayanan Pembangunan Mental Spiritual Masyarakat di Era Pandemi Covid 19. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 5(1), 76-89.
- Muchlis, S. (2020). Strategi Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam Saat Pandemi Covid-19 di Kisaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*, 3(1), 9-17.
- Mustofa, S. (2020). *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. SPASI MEDIA.
- Nugraha, F. (2013). Penyuluhan Agama Transformatif: Sebuah Model Dakwah. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 7(21).
- Nugraha, F. (2018), *Mereka Yang Keluar: TKW dan Perubahan Sosial di Perdesaan*. Bandung: Lekkas.
- Nugraha, F. [ed.] (2021). *Penyuluhan Agama Dalam Kemodernan Dan Kebhinekaan*. BKI UIN Bandung.
- Nurkholis, N., Istifianah, I., & Rahman, A. S. (2020). Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(1), 25-36.
- Nurulita, F. S., & Primadini, I. (2021). Peran key opinion leader dalam pemasaran film bertema kekerasan seksual. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 5(2).
- Oktaviana, R. (2021) *Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Penyebaran Radikalisme di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Prakoso, A. R. (2019). Efforts to Build Village Community Awareness in Supervising the Use of Village Funds. *Law Research Review Quarterly*, 5(1), 123-134.
- Putra, D. K. S. (2015). *Komunikasi CSR politik: membangun reputasi, etika, dan estetika PR politik*. Indonesia: Kencana.

Tatar Pasundan

Jurnal Diklat Keagamaan

pISSN 2085-4005; eISSN 2721-2866

Volume 16 Nomor 2 Tahun 2022

- Rosdialena, R., Dewita, E., Maiseptian, F., Thaheransyah, T., & Herawati, A. A. (2021). Keterampilan Komunikasi Terapeutik Penyuluh Agama di Kota Padang. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(2), 209-224.
- Sadono, D. (2009). Perkembangan pola komunikasi dalam penyuluhan pertanian di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 7(2).
- Santiawan, I. N. (2020). Kinerja Penyuluh Agama Hindu Non Pns Ditinjau Dari Fungsi Penyuluh Di Masa Pandemi Covid-19. *Widya Aksara*, 25(2), 153-163.
- Sastro Atmodjo, Sunarno, (2021), *Komunikasi Antarbudaya*, Jawa Barat: Media Sains Indonesia.
- Sidqi, I., & Witro, D. (2021). Kebijakan Politik Hukum Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah. Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 16-29.
- Sirajuddin, Z., & Kamba, P. L. (2021). Persepsi Petani terhadap Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyuluhan Pertanian. *Jurnal Penyuluhan*, 17(2), 136-144.
- Subagyo, A. (2020). *Aplikasi Metode Riset: Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mix Methods*. Inteligencia Media.
- Sudirjo, Encep & Alif, (2021), *Komunikasi Dan Interaksi Sosial Anak*, Sumedang: CV Salam Insan Mulya.
- Sugiyono. (2012). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Syaputra, A. (2021). Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Penyebaran Informasi Pengelolaan Sampah Sungai Cidurian Selatan Kota Bandung. *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen*, 8(2), 38-49.